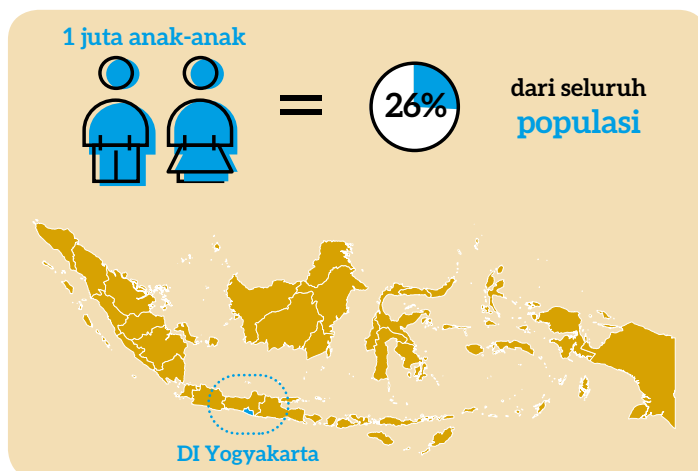




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi DI Yogyakarta termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 1 juta orang atau 26 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Dua dari tiga anak tinggal di wilayah perkotaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



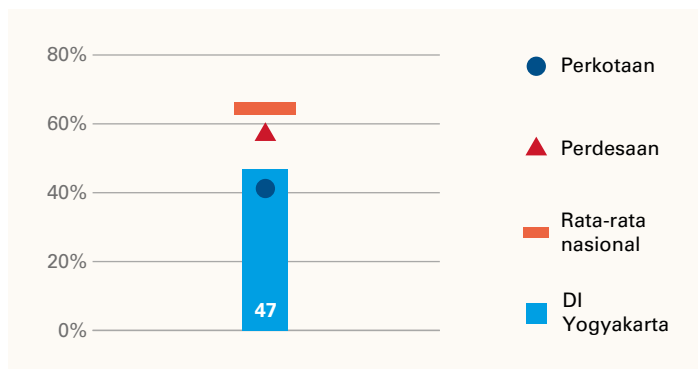
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Sekitar 169.000 anak (17,7 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 11.043 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi miskin dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, 47 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, dengan ketimpangan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi DI Yogyakarta

	Persen	Jumlah
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	14,9	550.000
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	17,7	169.000
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	58,4	558.000



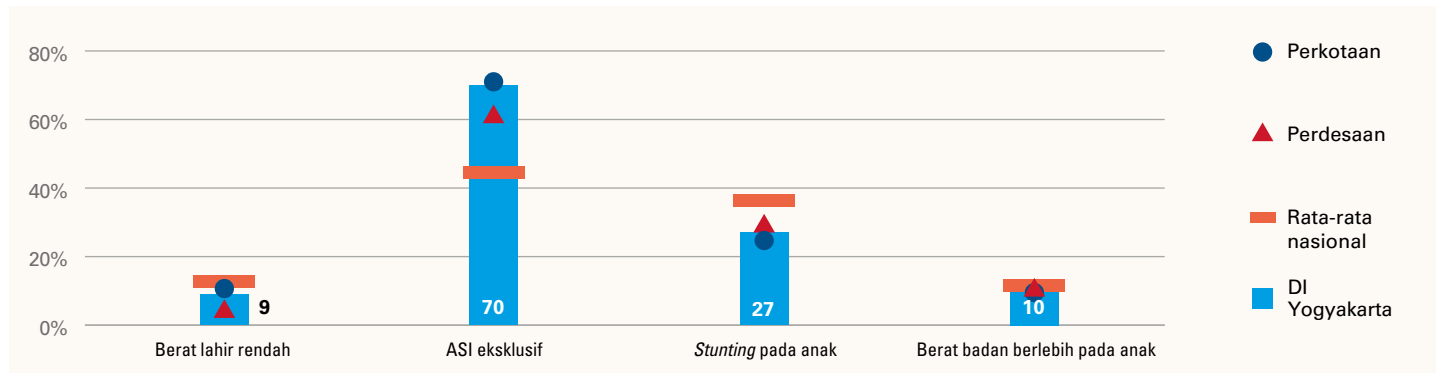
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Sekitar 70 persen bayi diberikan ASI eksklusif pada enam bulan pertama kehidupannya, salah satu angka yang tertinggi di Indonesia.

Namun, prevalensi malnutrisi masih relatif tinggi, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Satu dari 10 bayi lahir dengan berat badan rendah, dan 27 persen anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan wilayah dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



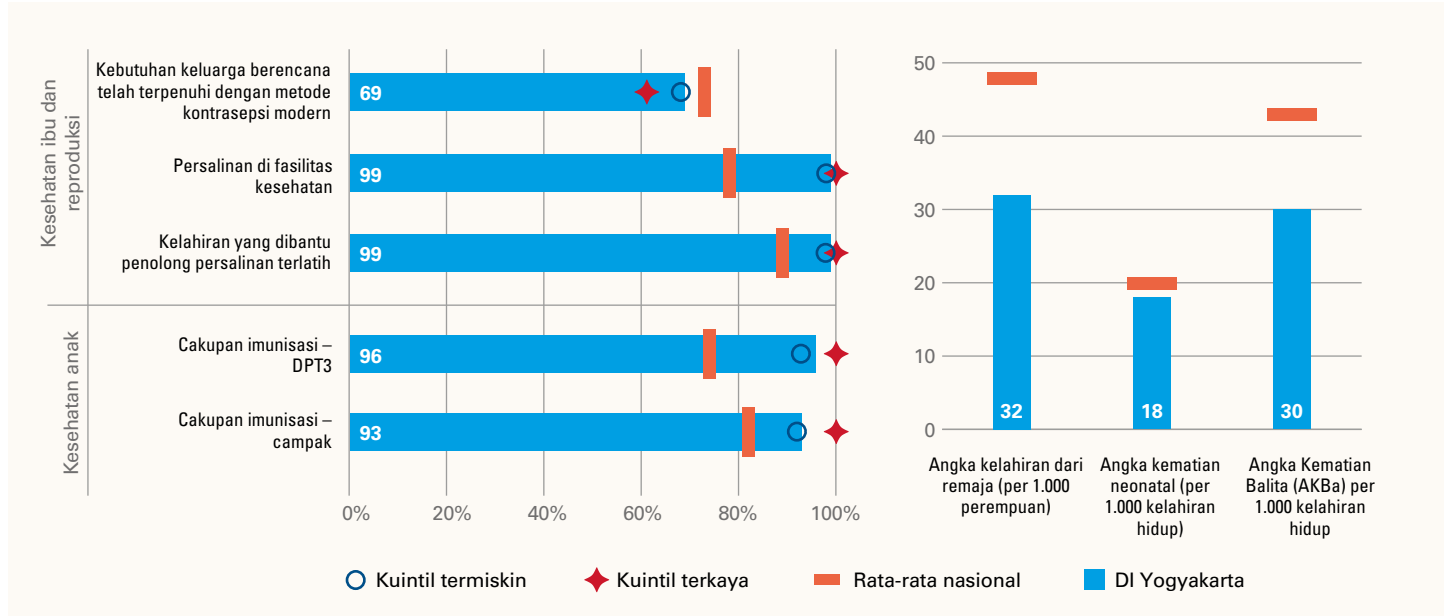
Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih menjadi tantangan. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 18 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 30 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Hampir semua perempuan dapat mengakses layanan persalinan, dengan 99 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan

terlatih. Namun, metode kontrasepsi modern masih perlu perbaikan, yang angkanya belum mencapai rata-rata nasional pada 2015.

Lebih dari 90 persen bayi menerima vaksinasi campak dan tiga dosis vaksin DTP yang dianjurkan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi, termasuk di antara anak-anak dari rumah tangga termiskin.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

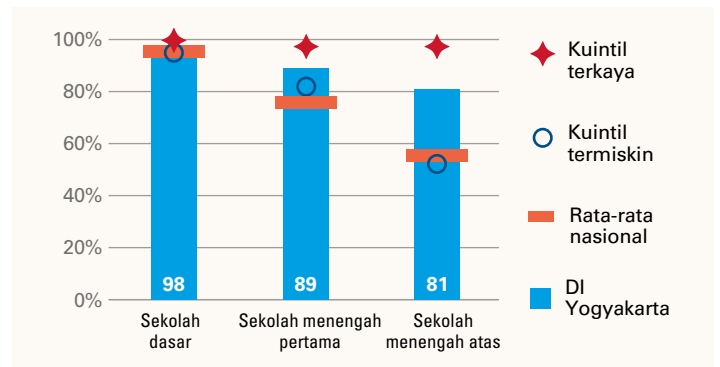


Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 98 persen pada tahun 2015, dan sebagian besar di antaranya masuk sekolah dasar lebih cepat.

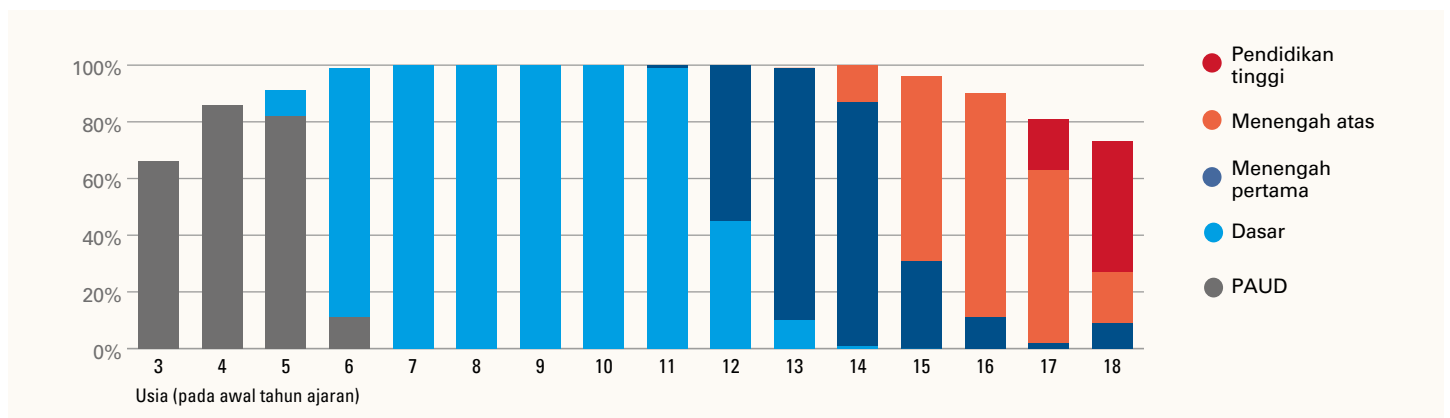
Provinsi DI Yogyakarta hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Provinsi ini salah satu yang berkinerja terbaik di Indonesia, tetapi hanya tiga dari empat anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan sepertiga dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

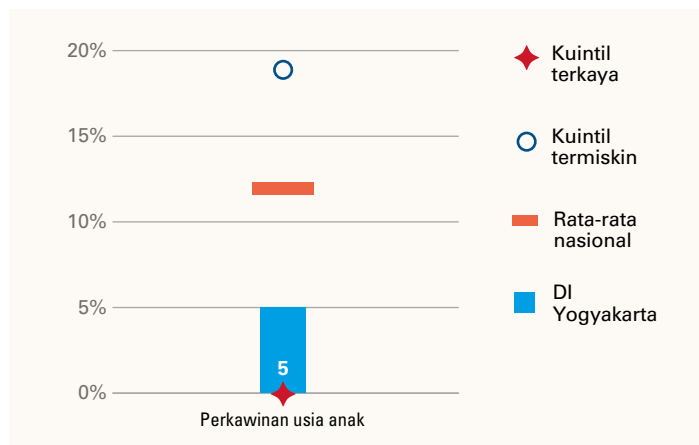


Di Provinsi DI Yogyakarta, sekitar 5 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015, dan angka ini di bawah angka rata-rata nasional. Praktik perkawinan usia anak paling banyak dialami anak perempuan dari rumah tangga yang lebih miskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak

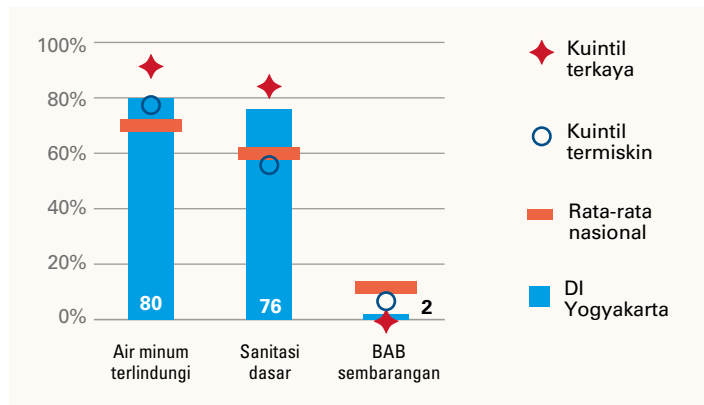


TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI



Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan higienitas sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, tiga per empat dari jumlah penduduk menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara 2 persen masih mempraktikkan BAB sembarangan. Cakupan sumber air minum yang layak sudah cukup tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.² Namun, survei pada tahun 2015 menemukan bahwa 67 persen rumah tangga

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



menggunakan air yang sudah terkontaminasi bakteri *Escherichia coli* (E. coli), sebuah petunjuk kuat terjadinya kontaminasi baru dari air limbah atau kotoran hewan.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik. Sejumlah kemajuan sudah dicapai melalui penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat.



Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	97
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	73

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	94
--	----

TUJUAN 16

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

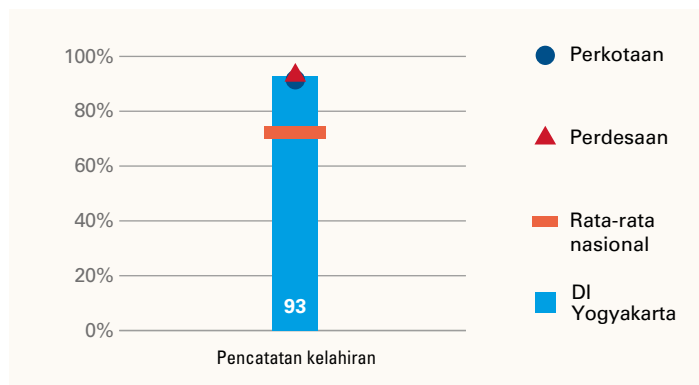


Provinsi ini telah mencapai cakupan pencatatan kelahiran yang tinggi. Pada tahun 2015, sembilan puluh tiga persen anak di bawah usia 5 tahun telah memiliki akta lahir. Perbedaan berdasarkan status kekayaan atau tempat tinggal rumah tangga relatif kecil.

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi DI Yogyakarta, 11 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, yang berarti lebih rendah daripada sebagian besar provinsi lain.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

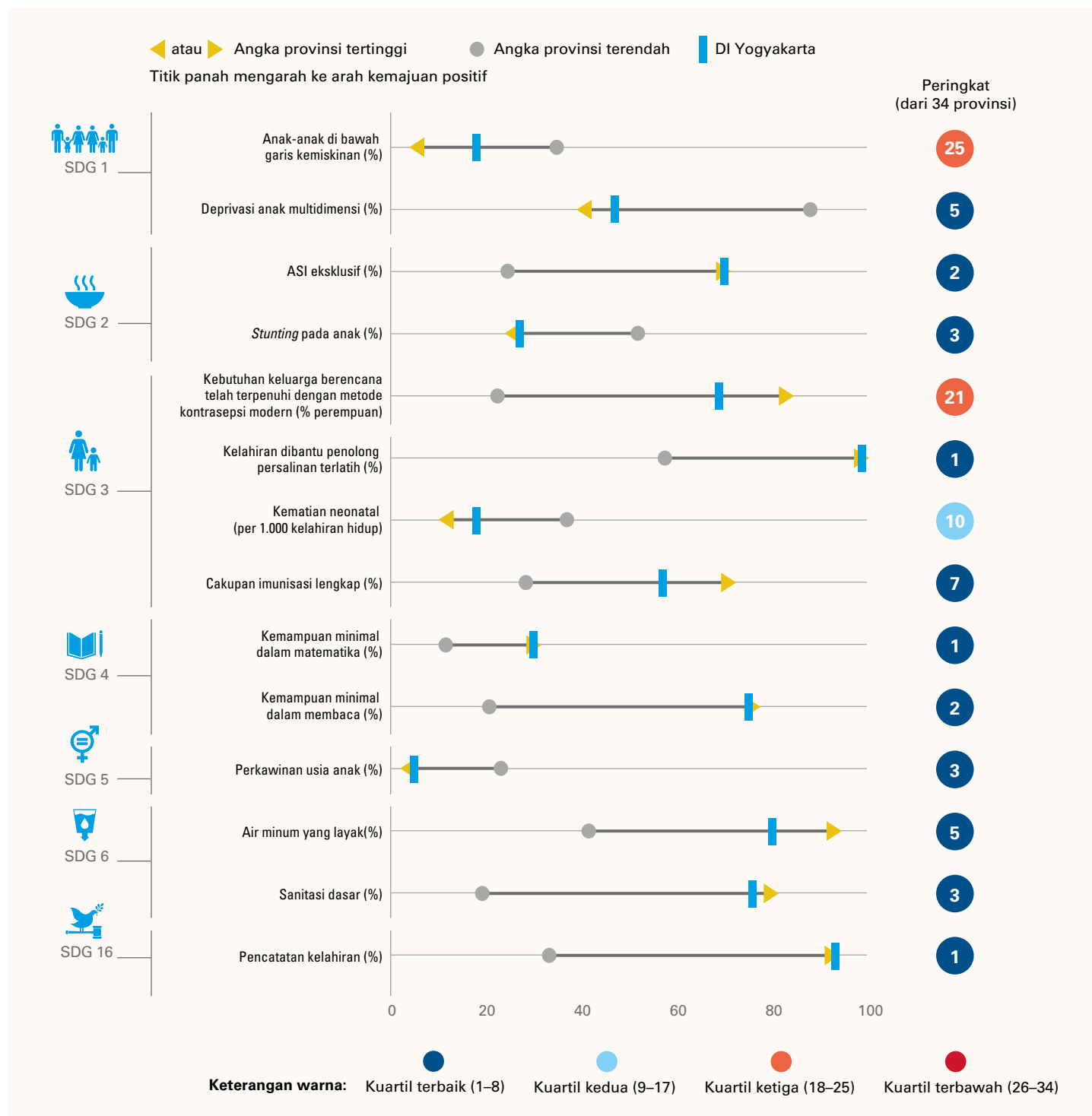
Ketimpangan berdasarkan wilayah pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi DI Yogyakarta dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi DI Yogyakarta dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi DI Yogyakarta untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan), serta Survei Kualitas Air di Yogyakarta (Pemerintah Indonesia/UNICEF). Informasi terperinci tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.

2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org